

DAFTAR ISI

- 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) SKPD**
- 2. NERACA SKPD**
- 3. LAPORAN OPERASIONAL (LO) SKPD**
- 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) SKPD**
- 5. CALK SKPD**

**SISTEMATIKA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD**

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD
 - 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - 2.2 Kebijakan keuangan
 - 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
 - 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
 - 5.1 LRA
 - 5.1.1 Pendapatan_LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.2 Neraca
 - 5.4.1 Aset
 - 5.4.2 Kewajiban
 - 5.4.3 Ekuitas
 - 5.3 LO
 - 5.2.1 Pendapatan -LO
 - 5.2.1 Beban
 - 5.2.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.2.4 Pos Luar Biasa
 - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1 Perubahan Ekuitas
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD
- Bab Penutup
- VII

**PENJELASAN ISI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD.

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD.

1. **Maksud** dari penyusunan CALK SKPD, diantaranya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan atas posisi keuangan di tiap – tiap SKPD sampai akhir periode pelaporan.
2. **Tujuan** diuraikan secara sistematis, tujuan pelaporan SKPD yang penyajian informasinya sangat bermanfaat bagi pengguna anggaran dalam mengambil keputusan di lingkungan SKPD.

B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD.

Memuat penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD.

Pelaporan Keuangan SKPD disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan, Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- i. Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Rembang;
- j. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
- k. Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022;
- l. Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 47);

C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD.

Menjelaskan mengenai sistematika isi catatan atas laporan Keuangan SKPD.

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD
 - 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD
 - 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD OPD
 - 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
 - 2.2 Kebijakan keuangan
 - 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD
 - 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- Bab IV Kebijakan akuntansi
 - 4.1 Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah OPD
 - 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD
 - 4.5 Kebijakan akuntansi tertentu
- Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD
 - 5.1 LRA
 - 5.1.1 Pendapatan_LRA
 - 5.1.2 Belanja
 - 5.2 LO
 - 5.2.1 Pendapatan -LO
 - 5.2.1 Beban
 - 5.2.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.2.4 Pos Luar Biasa
 - 5.3 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.1.8 Perubahan Ekuitas
 - 5.4 Neraca
 - 5.1.9 Aset
 - 5.1.10 Kewajiban
 - 5.1.11 Ekuitas
- Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan OPD
- Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

A. Ekonomi makro

Berdasarkan grafik trend nilai pertumbuhan ekonomi (RKPD TA. 2022) dan kaitannya dengan kecenderungan nilai inflasi serta permasalahan ekonomi yang menyertainya, untuk Tahun Anggaran 2022 target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang dalam skenario moderat.

Target moderat tersebut didasari dengan pertimbangan stabilitas ekonomi makro Kabupaten Rembang dapat terjaga, investasi diperkirakan akan terus meningkat, pembangunan infrastruktur kegiatan mantap dengan adanya program empat pilar. Akan tetapi kebutuhan belanja daerah menunjukkan angka yang menurun pada tahun ini karena terdapat perundangan desa yang bersinggungan dengan kegiatan belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sehingga banyak belanja yang tidak dilaksanakan, sementara peningkatan PAD tidak sejalan dengan kebutuhan. Berbagai upaya terus dilakukan agar dapat meningkatkan sumber – sumber PAD tanpa harus membebani masyarakat melalui cara – cara konvensional serta berupaya memperoleh sumber – sumber pembiayaan, baik dari DAU, DAK, Bantuan Propinsi maupun sumber-sumber lain yang sah guna membiayai kebutuhan daerah. Alokasi Anggaran untuk Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang sesuai yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Rembang terkait pelaksanaan program/kegiatan untuk pos belanja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 332.937.203.064,- dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 90.221.040.128,-

Sedangkan arah kebijakan perekonomian Kabupaten Rembang pada tahun 2022 tetap disinergikan dengan arah kebijakan nasional yang diarahkan untuk mendorong kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi serta memperhatikan lingkungan internal dan eksternal.

Berkaitan dengan itu, maka kebijakan lokal Kabupaten Rembang tahun 2022 secara umum diarahkan dalam pemecahan permasalahan mendesak dan urgent, serta mengakselerasikan program-program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan program empat pilar pembangunan Kabupaten Rembang yang di arahkan dalam rangka:

- a. Meningkatkan kesejahteraan, kualitas hidup, kemampuan dan kapasitas ekonomi dan sosial masyarakat terutama dipedesaan.
- b. Meningkatkan ikatan komunitas masyarakat sekitar kawasan yang memiliki tanggungjawab untuk menjaga kelestarian dan keamanannya.
- c. Meningkatkan mutu dan produktifitas produk unggulan yang dikembangkan.
- d. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Mendorong dan mempercepat pengembangan wilayah demi mencapai kemajuan dan kemandirian daerah.

B. Kebijakan keuangan

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca Daerah SKPD. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya, dibandingkan dengan anggaran sehubungan dengan realisasi anggaran SKPD. Disajikan berdasarkan kelompok uraiannya, baik itu kebijakan pendapatan SKPD (untuk SKPD yang mengampu pendapatan) tentang strategi dan prioritas pendapatan diterimanya, dan kebijakan belanja SKPD, tentang optimalisasi pengeluaran yang telah dilaksanakan SKPD.

C. Indikator pencapaian target kinerja APBD SKPD

Memuat penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja APBD SKPD, berupa indikator program dan kegiatan SKPD yang dilaksanakan pada tahun pelaporan. Indikator pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD. *(dilampirkan LRA SKPD dengan prosentase pencapaian target dalam satu periode atau per 31 Desember 2022)*

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD pada SKPD, berupa realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan SKPD.

Disajikan dengan prosentase dan grafik sesuai dengan kelompok uraiannya, yaitu pendapatan dan belanja. Dibandingkan antara realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan tahun pelaporan. Dengan perbandingan tersebut akan tampak capaian kinerjanya. Apakah naik atau turun.

B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Memuat hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada SKPD, baik kendala dan hambatan yang bersifat dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeure).



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, yang merupakan unit pemerintahan sebagai pengguna anggaran/ pengguna barang yang didalamnya terdapat unit – unit kerja dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.

Sementara entitas pelaporan adalah unit pemerintah daerah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan laporan pertanggungjawaban daerah.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang adalah *Basis Akrual* baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Laporan Operasional dan Neraca serta Laporan Perubahan Ekuitas.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Sementara Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan.

Anggaran yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang masih merupakan basis kas, untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan OPD

1. Pendapatan LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

2. Belanja

Belanja semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4. Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya.

Pendapatan – LO diakui sesuai dengan penetapannya.

5. Beban LO

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional.

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya :
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

7. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan.

8. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa kas yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember 2022.

Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran baik uang logam, kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

9. Investasi Jangka Pendek

Adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Pendek diakui berdasarkan bukti investasi dan dicatat sebesar nilai perolehan. Investasi Jangka Pendek dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

10. Piutang

Piutang merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang terdiri dari Piutang Pajak, Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang



11. Penyisihan Piutang

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Perhitungan penyisihan piutang berdasarkan atas pengolongan kualitas umur piutang terdiri atas kualitas lancar, kualitas kurang lancar, kualitas diragukan dan kualitas macet.

Batasan atas kelompok umur piutang, dikelompokkan atas kelompok umur tahun baik untuk piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya.

12. Beban di bayar dimuka

Adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Beban di bayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban dan diukur berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

13. Persediaan

Persediaan diakui pada saat diterima atau hal kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stok opname).

Persediaan diakui berdasarkan nilai barang yang belum dapat terjual atau terpakai.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir/harga standar apabila diperoleh dengan cara memproduksi sendiri.

14. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi jenis ini diharapkan akan berakhir dalam jangka waktu tertentu, seperti investasi dalam bentuk dana bergulir, obligasi atau surat utang. Investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa ditarget.

15. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya jika kepemilikannya kurang dari 20 %.

Dan jika kepemilikannya 20 % atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan daerah. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

16. Aset Tetap

Penilaian dan Pengukuran Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- a. Penambahan aset tetap berasal dari belanja modal, belanja barang yang menghasilkan aset tetap, hibah berupa barang modal dan penilaian



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

aktiva tetap yang telah dikuasai tetapi belum memiliki nilai buku. Pengurangan aset tetap bila ada hibah aset tetap kepada pihak ketiga dan ada penghapusan aset tetap;

- b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dalam kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan atau siap untuk digunakan/dipakai;
- c. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah;
- d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi atau sumbangan/hadiah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya pada saat diperoleh dan dikuatkan dengan adanya Berita Acara Penyerahan dari pihak ketiga kepada Pemda;
- e. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan;
- f. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang dan hilang. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Batas jumlah biaya untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja, ditentukan dengan menetapkan Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap Barang Milik/Kekayaan Daerah yang meliputi:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, alat olah raga yang sama dengan, atau lebih dari Rp 300.000,00;
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp 10.000.000,00.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset ini dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/jaringan/irigasi dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Barang tidak bergerak dan barang bergerak yang mempunyai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset sebagaimana di atas dicatat dalam pembukuan (*intra komptable*) dan menambah aset daerah.

BM/KD yang mempunyai nilai Aset di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap dan hewan, ikan, dan tanaman, buku bahan bacaan dicatat di dalam buku inventaris di luar pembukuan (*ektra komptable*);

- h. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :
 - 1)Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara bertambah ekonomis/efisien, dan/atau bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau,bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
 - 2) Bukan merupakan pemeliharaan yang bersifat rutin;
 - 3)Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

- i. Kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Batas Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.	Tanah	Seluruhnya
2.	Peralatan dan mesin	
	Alat-alat Berat	≥ 10.000.000
	Alat-alat Angkutan	
	- Angkutan roda 4	≥ 5.000.000
	- Angkutan roda 2	≥ 1.000.000
	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	≥ 1.000.000
	Alat-alat Pertanian/Peternakan	≥ 1.000.000
	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	≥ 1.000.000
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	≥ 1.000.000
	Alat-alat Kedokteran	≥ 1.000.000
	Alat-alat Laboratorium	≥ 1.000.000
	Alat Keamanan	≥ 1.000.000
3.	Gedung dan bangunan	
	Bangunan gedung	≥ 50.000.000
	Bangunan monumen	≥ 50.000.000
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	
	Jalan	≥ 50.000.000
	Bangunan air (Irigasi)	≥ 50.000.000
	Instalasi	≥ 50.000.000
	Jaringan	≥ 50.000.000
5.	Aset tetap lainnya	
	Buku dan perpustakaan	Tdk kapitalisasi
	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga	≥ 1.000.000
	Hewan/Ternak & Tumbuhan	Tdk kapitalisasi

- j. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang diakui pada saat serah terima barang dan jasa dilakukan (BA serah terima barang dan jasa) sebesar nilai yang tercantum dalam BA serah terima.

17. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya pembebasan tanah, belanja untuk memperoleh hak, pengukuran dan belanja penimbunan.

18. Peralatan dan Mesin

Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya langsung untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Mesin dan peralatan yang diperoleh dari dana donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kendaraan sampai dengan siap untuk



digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya. Untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

Kendaraan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar/harga gantinya mebelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan. Mebelair dan perlengkapan yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar.

19. Gedung dan Bangunan

Gedung diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membengun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, harga pengurusan IMB notaris dan pajak.

20. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membengun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya lain-lain sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap untuk digunakan.

Instalasi dan jaringan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi dan jaringan sampai dengan siap untuk digunakan.

Bangunan air diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

21. Aset Tetap Lainnya

Buku perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Hutan ternak dan tanaman diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan hutan ternak dan tanaman tersebut siap untuk dimanfaatkan.

22. Konstruksi dalam Pengerjaan

Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada konstruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

23. Biaya Penyusutan dan Akumulasi Penyusutan

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Nilai penyusutan untuk masing-masing periode (merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu periode yang dihitung tiap bulan) diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Masa manfaat aset tetap terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4. 2 Masa Manfaat Aset Tetap

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Idle disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :

- Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan sesuai dengan table dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang.

24. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieleminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CALK ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/ sosial signifikan di masayang akan datang setelah ada Keputusan Kepala Daerah.

25. Aset lainnya

Aset lainnya terdiri dari aset tidak berwujud yang adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki dan digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

- a) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- c) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
- d) Aset Tidak Berwujud;
- e) Aset Lain-lain.

26. Kewajiban Jangka Pendek

Bagian lancar kewajiban jangka panjang diakui pada saat periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran bagian lancar kewajiban jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan. Kewajiban jangka pendek diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

Yang masuk dalam akun kewajiban jangka pendek adalah :

- a). Utang PFK
- b). Utang Bunga
- c). Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- d). Pendapatan Diterima Dimuka
- e). Utang Beban

27. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan kewajiban yang telah diakui dalam periode berjalan. Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar pemerintah yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan.

28. Ekuitas Dana

Adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dihitung dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standart Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan OPD Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang yang berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan SKPD atau pemerintah daerah setempat.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

I. PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAPATAN DAERAH

No	Akun	2022		%	2021 Realisasi (Rp)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
	1	2	3	4=3/2	5
1	Pendapatan Retribusi Daerah	5.345.000.000	2.975.680.678	55,67	762.025.000
2	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	30.000.000	12.699.000	42,33	4.419.000
	Jumlah	5.375.000.000	2.988.379.678	55,60	766.444.000

Realisasi Pendapatan Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2022 sebesar Rp. 2.988.379.678,00 atau 55,60 % dari anggarannya sebesar Rp. 5.375.000.000,00 dan meningkat sebesar Rp. 2.221.935.678,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 766.444.000,00.

Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp. 2.988.379.678,00 atau 55,60% dari anggarannya sebesar Rp. 5.375.000.000,00 yang terdiri dari:

Akun	2022		%	2021 Realisasi (Rp)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4=3/2	5
Retribusi Daerah	5.345.000.000	2.975.680.678	55,67	762.025.000
Lain-lain PAD yang Sah	30.000.000	12.699.000	42,33	4.419.000
Jumlah	5.375.000.000	2.988.379.678	55,60	766.444.000

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2022 Rp. 2.988.379.678,00 meningkat sebesar Rp. 2.221.935.678,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 766.444.000,00 yang terdiri dari:



a. Pajak Daerah

Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah dari pos Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2022 tidak terdapat belanja penerimaan pajak daerah.

b. Retribusi Daerah

Pendapatan dari Retribusi Daerah TA 2022 bersumber dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha semuanya terealisasi sebesar Rp. 2.975.680.678,00 atau 55,67% dari anggaran sebesar Rp. 5.345.000.000,00 meningkat sebesar Rp. 2.213.655.678,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 762.025.000,00 yang terdiri dari:

Akun	2022		%	2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4=3/2	5
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.195.000.000	468.540.678	0	0
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.750.000.000	804.960.000	55,67	762.025.000
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.400.000.000	1.702.180.000	0	0
Jumlah	5.345.000.000	2.975.680.678	55,67	762.025.000

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

Tidak terdapat pendapatan dari belanja Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2022 sebesar Rp. 12.699.000,00 atau 42,33% dari anggarannya sebesar Rp. 30.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp. 16.407.000,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 4.419.000,00 yang terdiri dari:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021

Akun	2022		%	2021
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4=3/2	5
1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	30.000.000	12.699.000	42,33	4.419.000
Jumlah	30.000.000	12.699.000	42,33	4.419.000

- *Pendapatan Retribusi Daerah terdiri dari :*
 - o *Retribusi Jasa Umum yang berasal dari Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan anggaran sebesar Rp. 1.195.000.000 realisasi Rp. 468.540.678 tidak memenuhi targetnya karena pada tahun 2022 tidak ada penambahan Menara Telekomunikasi dan pada tahun 2022 ada kenaikan anggaran/target pendapatan pada kegiatan tersebut yang mana pada tahun 2022 ini merupakan pindahan dari OPD DPKP Kabupaten Rembang dengan BA Penyerahan Nomor 600/030/2022 Tgl. 03 Januari 2022.*
 - o *Retribusi Jasa Usaha yang berasal dari Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor dengan anggaran Rp. 1.750.000.000 hanya terealisasi sebesar Rp. 804.960.000 karena disamping kondisi Alat Berat (Excavator, Buldozer) sudah pada tua sehingga kalah bersaing dengan kepemilikan swasta/perorangan, dan untuk walles penyewa dari desa juga berkurang karena sebagian kegiatannya merupakan jalan beton/cor sehingga tidak menyewa walles. Dan Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dianggarkan sebesar Rp. 2.400.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.702.180.000 tidak memenuhi targetnya diantaranya karena masa transisi dari IMB ke PBG yang mana harus mengupload semua persyaratan ke SIMBG untuk penerbitan izinnya, jadi untuk masyarakat pedesaan masih ada yang kesulitan untuk mengaksesnya karena memerlukan jaringan internet. Dan IMB ini juga merupakan pindahan dari OPD DPKP Kabupaten Rembang dengan BA Penyerahan Kegiatan IMB Nomor 601/030/2022 Tgl. 03 Januari 2022.*
- *Dan untuk Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan (Drum Bekas) juga tidak memenuhi target dari anggarannya yaitu Rp. 30.000.000,- yang hanya terealisasi sebesar Rp. 12.699.000,- dikarenakan sebagian hasil pengadaan Aspal pada Tahun 2022 disediakan untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan tahun 2023.*



BELANJA DAERAH

Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang TA 2022 adalah sebagai berikut:

No	Akun	2022		%	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
1	Belanja Pegawai	8.667.521.000	8.423.481.338	97,18	8.142.077.027
2	Belanja Barang	7.419.128.000	6.906.570.879	93,09	8.717.795.743
3	Belanja Hibah	4.942.000.000	4.936.636.600	99,89	0
4	Belanja Modal	311.908.554.064	122.006.445.583	39,12	54.699.372.768
	Jumlah	332.937.203.064	142.273.134.400	42,73	71.559.245.538

Realisasi Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang TA 2022 sebesar Rp. 142.273.134.400,00 atau 42,73% dari anggarannya sebesar Rp. 332.937.203.064,00 meningkat sebesar Rp. 70.713.888.862,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 71.559.245.538,00.

a) Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 sebesar Rp. 8.423.481.338,00 atau 97,18% dari anggarannya sebesar Rp. 8.667.521.000,00. Realisasi TA 2022 meningkat sebesar Rp. 281.404.311,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 8.142.077.027,00 yang terdiri dari:

	Akun	2022		%	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
a	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.893.801.000	5.852.146.035	0.99	5.954.291.081
b	Tambahan Penghasilan PNS	2.097.190.000	1.983.115.303	0.95	1.759.275.946
c	Belanja Pegawai (Belanja Langsung)	676.530.000	588.220.000	0.87	428.510.000
	Jumlah	8.667.521.000	8.423.481.338	0.97	8.142.077.027



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021

- Belanja Gaji dan Tunjangan
Terjadi penurunan karena ada beberapa pegawai yang pensiun meskipun ada penambahan pegawai baru dari CPNS 2 orang dan untuk Bidang Gedung dan Bina Jasa Konstruksi yang merupakan pindahan dari DPKP belanja gaji masih ikut di DPKP.
- Tambahan Penghasilan PNS
Terjadi peningkatan karena pada tahun 2022 ada kenaikan TPP dan juga ada pengangkatan dari CPNS ke PNS.
- Belanja Pegawai (Belanja Langsung)
Belanja pegawai tersebut terdiri dari honorarium pegawai melekat pada pekerjaan fisik/kontraktual yang mana pada tahun 2022 kegiatan bertambah dari tahun sebelumnya sehingga mengalami peningkatan.

2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2022 sebesar Rp. 6.906.570.879,00 atau 93,09% dari anggaran sebesar Rp. 7.419.128.000,00 menurun sebesar Rp. 1.811.224.864,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 8.717.795.743,00.

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA. 2022 menurun karena dari pagu anggarannya menurun dibandingkan dengan tahun 2021 disebabkan adanya belanja bahan baku yang harusnya masuk pada belanja barang dan jasa dianggarkan pada belanja modal. Dan juga dari beberapa balenja kegiatan ada realisasi yang kurang dari 90% diantaranya:

No	Program/Kegiatan	%	Keterangan
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82.62	<i>Honor Ebudgeting tidak bisa dicairkan</i>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.55	<i>Pencairan honor Finger Print dibatasi 1 orang, tidak boleh ada pembantu finger print, dan honor manajemen kepegawaian tidak bisa direalisasikan sehingga anggarannya tidak terserap semua.</i>
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.93	<i>Honor Sirup tidak bisa dicairkan.</i>



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	00.00	<i>Untuk belanja ATK dan Penggandaan tidak direalisasikan</i>
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	59.88	<i>Efisiensi belanja ATK dan Penggandaan</i>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	89.98	<i>Honor tidak direalisasikan semua, pencairan disesuaikan dengan SK Honor Tim B</i>
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	49.92	<i>Efisiensi belanja Penggandaan, Bahan Komputer dan Belanja alat listrik serta jasa laundry.</i>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	87.22	<i>Untuk kegiatan olah raga hari jumat ditiadakan dan rapat dinas berkurang intensitasnya karena masih pandemi.</i>
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	58.32	<i>Perjalanan dinas luar daerah difocusing sehingga belanja BBM menyesuaikan perjalanannya.</i>
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	76.35	<i>Jasa pengiriman berkurang intensitasnya</i>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	57.72	<i>Efisiensi belanja pada kegiatan tersebut.</i>
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.00	



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021

5	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	86.30	<i>Efisiensi pada belanja perjalanan dinas.</i>
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	89.13	<i>Efisiensi pada belanja BBM</i>
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	89.35	<i>Efisiensi pada belanja Pengandaan dan BBM</i>
7	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
	Pemeliharaan Rutin Jalan	81.73	<i>Sisa tender pengadaan aspal</i>
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	83.89	<i>Efisiensi belanja perjalanan dinas, dan sisa pengadaan bahan baku bangunan.</i>

3. Belanja Bunga

Tidak ada Belanja Bunga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

4. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp. 4.936.636.600,00 atau 99,89% dari anggarannya sebesar Rp. 4.942.000.000,00 meningkat sebesar Rp. 4.942.000.000,00 dibandingkan dengan TA 2021 karena tahun sebelumnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tidak ada belanja hibah dan baru dari Bidang Sanitasi dan Air Minum 12 paket kegiatan dan Bidang Gedung dan Bina Jasa Konstruksi 1 paket.

5. Belanja Bantuan Sosial

Tidak ada Belanja Bantuan Sosial pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021

b) Belanja Modal

Relisasi belanja modal TA 2022 sebesar Rp. 122.006.445.583,00 atau 75,98% dari anggaran sebesar Rp. 311.908.554.064,00 meningkat sebesar Rp. 20.292.266.482,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 54.699.372.768,00 yang terdiri dari:

	Belanja Modal	2022		%	2021
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
	1	2	3	4=3/2	5
a.	Tanah	120.000.000.000	20.188.730.520	0,17	0
b.	Peralatan dan Mesin	167.900.000	156.721.000	0,93	406.430.960
c.	Gedung dan Bangunan	7.857.197.822	7.569.470.308	0,96	0
d.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	183.883.456.242	94.091.523.755	0,51	34.000.675.326
e.	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	60.820.000
	JUMLAH	311.908.554.064	122.006.445.583	0,39	34.467.926.286

Penjelasan belanja modal realisasinya kurang dari 90% :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	%	Keterangan
1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	79.08	- Ada pekerjaan yang dibayar sesuai progress lapangan 75% dan 91% - Merupakan silfa sisa tender (anggaran)
	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	83.03	Efisiensi anggaran dari belanja Honor Pengadaan Barang dan Jasa, dan dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		
	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	84.53	Merupakan silfa sisa tender (anggaran)
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	55.56	Pekerjaan fisik baru termyn I 50% sesuai prgress dilapangan



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021

4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	82.21	<i>Ada beberapa paket pekerjaan yang berjalan hanya perencanaan dan fisik tidak dilaksanakan</i>
5	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	86.01	<i>Ada efisiensi anggaran dari Belanja Honor tim penilai teknis, dan Honor tim pemilik serta belanja perjalanan dinas</i>
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		
	Penataan Bangunan dan Lingkungan	89.42	<i>Merupakan silfa sisa tender (anggaran)</i>
7	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		
	Pembangunan Jalan	10.98	<i>- Belanja Modal Tanah tidak berjalan karena lebar jalan belum sesuai dengan peraturan terbaru (L:40m) - Kegiatan yang bersumber DAU Pinjaman belum selesai dan terbayar 100% - Ada silfa sisa tender (anggaran)</i>
	Pelebaran Jalan Menuju Standar	30.79	<i>- Kegiatan yang bersumber DAU Pinjaman belum selesai dan terbayar 100% - silfa sisa tender (anggaran)</i>
	Pemeliharaan Berkala Jalan	87.32	<i>Merupakan silfa sisa tender (anggaran)</i>
	Pembangunan Jembatan	76.81	<i>Pembayaran fisik baru 75% sesuai progress dilapangan</i>
	Rehabilitasi Jembatan	75.38	<i>Merupakan silfa sisa tender (anggaran)</i>



c) Belanja Tidak Terduga

Tidak ada Belanja Tidak Terduga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

TRANSFER

Tidak ada Belanja Transfer pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

SURPLUS (DEFISIT)

Surplus (Defisit) merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang TA 2022 mengalami defisit sebesar Rp. 139.284.754.722,00 dari anggaran yang dianggarkan sebesar Rp. 327.562.203.064,00.



**B. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
ASET**

1. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2022 <hr/> Rp. 0,00	31 Desember 2021 <hr/> Rp. 0,00
--	--	--

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah saldo kas pada bendahara pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 belum disetor ke rekening kas daerah. Kas di bendahara pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 meningkat/menurun sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo Tahun 2022 sebesar Rp. 0,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Sisa saldo UP disetorkan pada tanggal 30 Desember 2022 secara tunai sebesar Rp. 2.064.239,00 sehingga saldo UP menjadi Rp. 0,00.

2. Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2022 <hr/> Rp. 0,00	31 Desember 2021 <hr/> Rp. 0,00
---	--	--

Kas di bendahara penerimaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang merupakan uang yang masih ada pada bendahara penerimaan dan belum disetorkan ke rekening kas daerah sampai dengan 31 Desember 2022 (Pendapatan ditangguhkan). Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 meningkat/menurun sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00.

Tidak ada kas di Bendahara Penerimaan pada akhir 31 Desember 2022, karena semua Penerimaan telah disetor ke rekening Pendapatan Daerah/Penerimaan karena pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang tidak memiliki rekening Penerimaan sendiri.

3. Kas Lainnya	31 Desember 2022 <hr/> Rp. 0,00	31 Desember 2021 <hr/> Rp. 0,00
-----------------------	--	--

Tidak ada Kas Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang, sehingga pada 31 Desember 2022 tidak ada Kas Lainnya.

4. Piutang Pajak	31 Desember 2022 <hr/> Rp. 0,00	31 Desember 2021 <hr/> Rp. 0,00
-------------------------	--	--

Piutang pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 tetap bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.

Tidak ada Piutang Pajak pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021

5. Piutang Retribusi	31 Desember 2021	31 Desember 2020
	Rp. 326.800.483,00	Rp. 500.000,00

Piutang retribusi daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 326.800.483,00 meningkat sebesar Rp. 326.300.483,00 dari saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 500.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)
1	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	325.750.483,00	0,00
2	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.050.000,00	500.000,00
	Jumlah	326.800.483,00	500.000,00

Piutang Retribusi berasal dari Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang merupakan pindahan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp. 325.750.483,00 dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp. 1.050.000,00 dimana penyewa belum membayar pada tahun 2022, dan baru membayar pada tahun berikutnya (2023) sehingga terdapat Piutang Retribusi Sebesar Rp. 326.800.483,00 dan meningkat sebesar Rp. 326.300.483,00 dari tahun 2021 sebesar Rp. 500.000,00.

6. Piutang Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp. 0,00	Rp. 0,00

Pada Tahun 2022 tidak ada Piutang Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

7. Penyisihan Piutang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp. 10.586.230,15	Rp. 2.500,00

Penyisihan piutang disajikan dalam rangka untuk memperoleh nilai piutang bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 10.586.230,15 meningkat sebesar Rp. 10.583.730,15 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.500,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021

Uraian	Saldo Awal	Mutasi 2022		Saldo Akhir	Aging Schedule				Penyisihan Piutang	Saldo Nrv	
		Penambahan	Pengurangan		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet			
					0-1 th (0,5%)	1- 2 th (10%)	2-3 Th (50%)	> 3 TH (100%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(6+7+8+9)	11=(5-10)	
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	333.898.777	460.392.384	468.540.678	325.750.483	290.143.850	21.682.639	13.923.994			10.580.980	315.169.503
Piutang Retribusi Kekayaan Daerah	500.000	1.050.000	500.000	1.050.000	1.050.000					5.250	1.044.750
Jumlah	334.398.777	461.442.384	469.040.678	326.800.483	291.193.850	21.682.639	13.923.994			10.586.230	316.214.253

8. Beban dibayar dimuka 31 Desember 2022
Rp. 0,00 31 Desember 2021
Rp. 0,00

Beban dibayar di muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00 merupakan premi asuransi atas kegiatan yang belum diterima manfaatnya.

Tidak ada Beban dibayar dimuka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

9. Persediaan 31 Desember 2022
Rp. 1.121.762.600,00 31 Desember 2021
Rp. 1.749.183.409,00

Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Nilai persediaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.121.762.600,00 menurun sebesar Rp. 627.420.809,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.749.183.409,00 dengan rincian sebagaiberikut :

No	Jenis Persediaan	31 Des 2022	31 Des 2021
1.	Persediaan Bahan Pakai Habis		
	Persediaan Alat Tulis Kantor	2.689.500	1.542.800
	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya		
2.	Persediaan Bahan/Material		
	Persediaan Bahan Baku Bangunan	1.119.073.100	1.747.640.609
	Jumlah	1.121.762.600	1.749.183.409



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 dilakukan penyesuaian akun (perhitungan terlampir) sehingga nilai persediaan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan	Per 31 Desember 2022
1	Bahan Pakai Habis	1.121.762.600
2	Bahan Tak Pakai Habis	
3	Barang Bekas Dipakai	
	Jumlah	1.121.762.600

Pada tahun 2021 terdapat kelompok Persediaan Barang Pakai Habis persediaan Alat tulis kantor sebesar : Saldo Awal Rp. 1.542.800,- Pembelian Rp. 255.715.750,- dan Pemakaian Rp. 254.569.050,- sehingga terdapat sisa Rp. 2.689.500,- dan Persediaan Bahan/Material : Saldo Awal Rp. 1.588.764.190,- Pembelian Rp. 6.087.592.373,- dan Pemakaian Rp. 6.557.283.463,- terdapat sisa barang persediaan Bahan/Material sebesar Rp. 1.119.073.100,- sehingga terdapat sisa persediaan sebesar Rp. 1.121.762.600,-. Untuk Tahun 2022 Persediaan Bahan/Material sebesar Rp. 1.119.073.100,- berasal dari Reklas belanja Modal Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan.

Persediaan Karcis

Tidak ada persediaan karcis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

10. Investasi Non Permanen

31 Desember 2022

Rp 0,00

31 Desember 2021

Rp 0,00

Tidak ada investasi non permanen di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

11. Investasi Permanen

31 Desember 2022

Rp 0,00

31 Desember 2021

Rp 0,00

Tidak ada Investasi permanen yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

12. Aset Tetap

31 Desember 2022

Rp. 756.260.917.944,50

31 Desember 2021

Rp. 712.957.401.297,50

Aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rembang yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang berada dibawah koordinasi



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021

SKPD yang bersangkutan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau keseluruhan APBD Pemkab. Rembang melalui pembelian, pembangunan dan pertukaran dengan aset lainnya.

Nilai saldo aset tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 756.260.917.944,50 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 712.957.401.297,50 tersaji sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Kenaikan/ Penurunan (Rp.)	%
a. Tanah	109.332.902.549,00	89.185.122.029,00	20.147.780.520	0
b. Peralatan dan Mesin	20.350.419.150,50	19.934.229.048,50	416.190.102	(0.14)
c. Gedung & Bangunan	2.212.293.438,00	2.221.153.438,00	(8.860.000)	8.92
d. Jalan, Irigasi & Jaringan	1.204.109.707.524,00	1.149.120.686.892,00	54.989.020.632	4.46
e. Aset Tetap Lainnya	454.650.000,00	454.650.000,00	0	100
f. Konstruksi dlm Pengerjaan	36.667.183.441,00	882.798.384,00	35.784.385.057	40.01
g. Akumulasi Penyusutan	(616.866.238.158)	(548.841.238.494)	(68.024.999.664)	11.83
Jumlah Aset Tetap	756.260.917.944,50	712.957.401.297,50	(43.303.516.647)	(1.77)

Sedangkan Peningkatan aset tetap dalam tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 43.303.516.647,00 (nilai penambahan 2022 – pengurangan 2022) atau sebesar 1.77 % dibanding dengan saldo per 31 Desember 2021, adalah sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021 (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	31 Desember 2022 (Rp.)
a. Tanah	89.185.122.029,00	20.147.780.520	0	109.332.902.549,00
b. Peralatan dan Mesin	19.934.229.048,50	416.190.102	0	20.350.419.150,50
c. Gedung & Bangunan	2.221.153.438,00	198.168.000,00	(8.860.000)	2.212.293.438,00
d. Jalan, Irigasi & Jaringan	1.149.120.686.892,00	54.989.020.632,00	0	1.204.109.707.524,00
e. Aset Tetap Lainnya	454.650.000,00	454.650.000,00	0	454.650.000,00
f. Konstruksi dlm Pengerjaan	882.798.384,00	882.798.384,00	35.784.385.057	36.667.183.441,00
g. Akumulasi Penyusutan	(548.841.238.494)		(68.024.999.664)	(616.866.238.158)
Jumlah Aset Tetap	712.957.401.297,50	87.283.956.859,00	64.950.753.004,50	756.260.917.944,50

Penambahan sebesar Rp. 87.283.956.859,00 berasal dari belanja modal, belanja barang di luar belanja modal, belanja pemeliharaan yang menghasilkan aset tetap (atau dapat dikategorikan dalam aset tetap) dan hibah berupa barang dari provinsi atau pusat serta mutasi barang dari SKPD lain. Penambahan aset tetap tersebut berasal dari reklasifikasi aset Jalan Kabupaten Lainnya ke Pagar permanen sebesar Rp. 198.168.000,00. Serta



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021

penambahan dari belanja modal pada Jalan, Jaringan, Irigasi sebesar Rp. 51.306.150.459.00, dari Penambahan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 454.650.000.00 Dan Penambahan Aset dari Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp. 353.249.884,00.

Pengurangan sebesar Rp. 64.950.753.004,50 berasal dari Penambahan belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 52.678.200,00 dan Reklasifikasi Akun sebesar Rp. 28.899.625,00 di kurangi Mutasi ke Pengelola sebesar Rp. 109.900.000,00 dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp. 64.922.430.829,50.

Saldo masing – masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tanah

Saldo Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 89.161.173.029,00 meningkat sebesar Rp. 0,00 jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 89.161.173.029,00.

N O	Tanah	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ penurunan
1	Tanah	109.332.902.549	89.185.122.029	20.147.780.520
	Jumlah	109.332.902.549	89.185.122.029	20.147.780.520

Aset Tanah tersebut tetap pada tahun 2021 tidak ada penambahan dari belanja modal, Mutasi maupun Reklasifikasi.

b. Peralatan dan Mesin

Saldo peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 19.934.229.048.50 menurun sebesar Rp. 28.322.175,00 dibandingkan saldo tahun 2020 sebesar Rp. 19.962.551.223.50 dengan rincian sebagai berikut:

No	Peralatan Mesin	31 Desember 2022	31 Desember 2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Alat Besar	14.293.702.086	14.293.702.086	0
2	Alat Angkutan	2.939.485.915	2.913.235.915	26.250.000
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	672.800.191	611.522.000	61.278.191
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	774.593.835.50	764.000.835.50	10.593.000
5	Alat Studio, Alat Komunikasi dan Pemancar	43.933.500	32.858.500	11.075.000
6	Alat Laboratorium	609.115.911	497.350.000	111.765.911
7	Komputer	1.016.787.712	821.559.712	195.228.000
	Jumlah	20.350.419.150,50	19.934.229.048.50	416.190.102



Penjelasan kenaikan/penurunan masing-masing kelompok peralatan dan mesin sebagai berikut:

- 1) Saldo Alat Besar per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 14.293.702.086,00 tetap jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 14.293.702.086,00.
- 2) Saldo Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 2.939.485.915,00 meningkat sebesar Rp. 26.250.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2.913.235.915,00. Peningkatan tersebut terjadi dari Mutasi masuk antar OPD DPKP sebesar Rp. 26.250.000,00. (*BA Mutasi Terlampir*)
- 3) Saldo Alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 672.800.191,00 meningkat sebesar Rp. 61.278.191,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 611.522.000,00 penambahan tersebut merupakan mutasi antar OPD DPKP sebesar Rp. 61.278.191,00 (*BA Mutasi Terlampir*)
- 4) Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 774.593.835.50 meningkat sebesar Rp. 10.593.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 764.000.835.50. Peningkatan tersebut karena ada realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 10.593.000,00 (*Kertas Kerja terlampir*).
- 5) Saldo Alat Studio, Alat Komunikasi dan Pemancar per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 43.933.500,00 meningkat sebesar Rp. 11.075.000,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 32.858.500,00 Peningkatan tersebut dari realisasi belanja modal tahun anggaran 2022 Rp. 11.075.000,00 (*Kertas Kerja terlampir*)
- 6) Saldo Alat Laboratorium per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 609.115.911,00 meningkat sebesar Rp. 111.765.911,00 bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 497.350.000,00. Penambahan tersebut dari Mutasi antar OPD DPKP sebesar Rp. Rp. 111.765.911,00. (*BA Mutasi Terlampir*).
- 7) Saldo Komputer per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.016.787.712,00 meningkat sebesar Rp. 195.228.000,00 bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 821.559.712,00. Peningkatan tersebut karena dari hasil belanja modal sebesar Rp. 111.828.000,00 Reklasifikasi Akun dari Pengadaan Tanah untuk Jalan Lainnya sebesar Rp. 40.950.000,00 dan mutasi antar OPD DPKP sebesar Rp. 42.450.000 (*Kertas Kerja dan BA Mutasi Terlampir*).



c. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.022.985.438,00
Meningkat sebesar Rp. 1.020.371.688,00 bila dibandingkan saldo TA 2020 sebesar
Rp. 2.022.985.438,00, dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1) Bangunan Gedung	890.786.928	899.646.928	-8.860.000
2) Monumen	311.991.750	311.991.750	0
3) Tugu Titik Kontrol/ Pasti	1.009.514.760	1.009.514.760	0
Jumlah	2.212.293.438	2.221.153.438	-8.860.000

- 1) Saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 890.786.928,00 menurun sebesar Rp. 8.860.000,00 jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 899.646.928,00. Penurunan tersebut terjadi karena adanya barang yang masuk kategori Ekstrakomtable. Dan pada tahun anggaran 2022 ada realisasi belanja modal bangunan gedung akan tetapi ada mutasi antar OPD Dishub sebesar Rp. 810.963.831,00 OPD BPBD sebesar Rp. 194.243.000,00, OPD DLH sebesar Rp. 1.720.574.670,00 dan ke Pengelola BMD sebesar Rp. 3.609.714.261,00 serta ada juga yang masuk dalam KDP sebesar Rp. 275.016.434,00 karena baru perencanaan untuk tahun berikutnya (*Kertas Kerja dan BA Mutasi Terlampir*).
- 2) Saldo Monumen per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 311.991.750,00 tetap jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 311.991.750,00. Dan pada tahun anggaran 2022 ada realisasi belanja modal Monumen akan tetapi ada mutasi ke Pengelola BMD sebesar Rp. 910.360.112,00 Dan pada tahun anggaran 2022 ada realisasi belanja sebesar Rp. 48.598.000 tetapi masuk dalam KDP karena baru perencanaan saja (*Kertas Kerja dan BA Mutasi Terlampir*).
- 3) Saldo Tugu Titik Kontrol/ Pasti per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.009.514.760,00 tetap jika dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.009.514.760,00. (*Kertas Kerja terlampir*).



d. Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 1.204.109.707.524,00 meningkat sebesar Rp. 54.989.020.632,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.149.120.686.892,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Jaringan dan Irigasi	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1) Jalan dan Jembatan	985.588.707.195,00	953.206.085.857,00	32.382.621.338,00
2) Bangunan Air (Irigasi)	203.054.013.924,00	186.171.214.085,00	16.882.799.839,00
3) Instalasi	9.304.414.700,00	9.304.414.700,00	0,00
4) Jaringan	6.162.571.705,00	438.972.250,00	5.723.599.455,00
Jumlah	1.204.109.707.524,00	1.149.120.686.892,00	54.989.020.632,00

Penjelasan masing-masing kelompok Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai berikut:

- 1) Saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 953.206.085.857,00 meningkat sebesar Rp. 32.382.621.338,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 953.206.085.857,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp. 64.306.096.764,00. dan penambahan dari Reklas Bangunan Air Kotor sebesar Rp. 1.773.629.064,00 dan serta Reklas dari KDP sebesar Rp. 21.790.000,00 juga ada pengurangan Saldo Jalan ke KDP sebesar Rp. 23.485.314.481,00 Jembatan ke KDP sebesar Rp. 6.597.330.509,00 dan Koreksi Nilai ke Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.555.033.950,00 serta Koreksi tidak dilanjutkan sebesar Rp. 86.698.550,00 (*Kertas Kerja dan Surat Pernyataan terlampir*).
- 2) Saldo Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 203.054.013.924,00 meningkat sebesar Rp. 16.882.799.839,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 186.171.214.085,00. Kenaikan tersebut terjadi karena penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp. 24.061.827.536,00, dan Reklasifikasi dari KDP sebesar Rp. 143.567.080,00 dan Pengurangan ke Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 1.773.362.906,00 ke KDP sebesar Rp. 5.543.482.713,00. serta Koreksi tidak dilanjutkan sebesar Rp. 5.483.000,00 (*Kertas Kerja dan Surat Pernyataan terlampir*).
- 3) Saldo Instalasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 9.304.414.700,00 tetap bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 9.304.414.700,00 tidak ada penambahan dari belanja modal maupun reklas akun dari akun lain.



- 4) Saldo Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.162.571.705,00 Meningkat sebesar Rp. 5.723.599.455,00 bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 438.972.250,00. Peningkatan tersebut terjadi karena ada penambahan dari realisasi belanja modal sebesar Rp. 5.723.599.455,00 (*Kertas Kerja terlampir*).

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 454.650.000,00 meningkat sebesar Rp. 0,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 454.650.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1	Bahan Perpustakaan/Buku	454.650.000	454.650.000	0
2	Barang bercorak	0	0	0
3	Hewan	0	0	0
4	Ikan	0	0	0
5	Tanaman	0	0	0
6	Barang Koleksi non Budaya	0	0	0
7	Aset tetap dalam renovasi	0	0	0
	Jumlah	454.650.000	454.650.000	0

Penjelasan masing-masing kelompok Aset Lainnya sebagai berikut:

Tidak ada penambahan dari kelompok aset lainnya, sehingga tetap seperti tahun 2021 sebesar Rp. 454.650.000,-.



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

No	Uraian	Tahun 2022
	<i>Bangunan Gedung</i>	
1	Pembangunan Gedung DINDIKPORA	88.411.000
2	Pembangunan Gedung DPUTARU	88.532.600
3	Pembangunan Gedung BPPKAD	98.072.834
	<i>Tugu</i>	
4	Penataan Tugu Batas Kota Barat dan Timur	48.598.000
	<i>Jalan</i>	
5	Peningkatan Jalan Dadapmulyo - Kalipang	13.000.000
6	Peningkatan Jalan Pasar - Pulo	1.117.692.902
7	Peningkatan Jalan Pamotan - Jape	2.020.736.552
8	Peningkatan Jalan Sarang - Bonjor - Lodan Wetan	2.773.601.989
9	Peningkatan Jalan Pasucen - Kajar (DAK)	2.282.621.338
10	Pelebaran Jalan Jl. A. Yani	1.058.187.600
11	Peningkatan Jalan Banyudono - Pengkol	446.780.000
12	Peningkatan Jalan Nglojo - Lodan	779.078.603
13	Peningkatan Jalan Jape - Clangapan	822.725.547
14	Pelebaran Jalan KS. Tubun	1.028.210.400
15	Pelebaran Jalan Sendangagung - Grawan	2.027.216.633
16	Pelebaran Jalan Kaliori - Wirote	13.000.000
17	Pelebaran Jalan Mojopahit - Pahlawan	1.520.712.076
18	Pelebaran Jalan Sarang - Lodan	1.175.438.333
19	Pelebaran Jalan Slamet Riyadi	1.270.604.700
20	Pelebaran Jalan Tegaldowo - Timbrangan	731.855.008
21	Pelebaran Jln Pamotan - Gunem	1.843.093.000
22	Pelebaran Jln Sedan - Lodan	658.703.867
23	Pelebaran Jalan Sulang - Banyuurip	1.887.555.933
24	Pelebaran Jalan Tahunan - Sale	14.500.000
	<i>Jembatan</i>	
25	Pembangunan Jembatan Temperak Kec. Sarang Kab. Rembang	7.190.993.130
26	Pemeliharaan Jembatan Gonggang	6.747.913
	<i>Bangunan Air Irigasi</i>	
27	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bd. Ngulakan Kec. Pamotan	58.190.000
28	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Emb. Kumendung Kec. Rembang	74.182.000
29	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sb. Brubulan Kec. Sale	79.170.000
30	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bd. Mojokerto Kec. Kragan	89.127.000
31	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bd. Pentil Kec. Kaliori	90.000.000
32	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Emb. Kasreman Kec. Rembang (DAK)	1.302.855.180
33	DED Embung Glebeg Desa Glebeg Kec. Sulang	77.443.000
34	Rehabilitasi D.I. Emb. Ds. Kasreman Kec. Rembang	39.587.770
35	Pembangunan DI. Embung Glebeg Desa Glebeg Kec. Sulang	3.662.515.533
	<i>Bangunan Air Kotor Lainnya</i>	
36	Revitalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	187.443.000
		36.667.183.441



Saldo KDP per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 36.667.183.441,- Meningkat sebesar Rp. 35.784.385.057,- bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 882.798.384,-. Peningkatan tersebut terjadi karena KDP dari Bangunan Gedung ada Pekerjaan yang baru Perencanaannya saja sebesar Rp. 275.016.434,- dari Tugu Rp. 48.598.000,- dan dari Jalan ada paket pekerjaan yang dari DAU, Dana Pinjaman, DAK belum selesai 100% sebesar Rp. 23.485.314.481,- dari Jembatan ada Jembatan Gonggang hanya cair perencanaannya saja sebesar Rp. 6.747.913,- Jembatan Temperak ada KDP tahun 2021 sebesar Rp. 600.410.534,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 6.590.582.596,- dari Bangunan Air Irigasi sebesar Rp. 5.473.070.483,- dan dari Bangunan Air Kotor Lainnya ada pekerjaan baru realisasi 50% saja sebesar Rp. 187.443.000,-.

g. Akumulasi Penyusutan

Nilai penyusutan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap. Penyusutan tidak termasuk Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Nilai akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. (616.866.238.158.00) naik sebesar Rp. 64.922.430.829,50) di badingkan dengan nilai akumulasi penyusutan TA 2021 setelah restatement sebesar Rp. (548.841.238.493,50) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Lebih (kurang)
1	Akumulasi Penyusutan	616.866.238.158.00	548.841.238.493,50	68.024.999.664,50
	Jumlah	616.866.238.158.00	548.841.238.493,50	68.024.999.664,50

(data akumulasi penyusutan secara utuh terlampir)



13. Aset Lainnya	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp. 44.347.916,67	Rp. 59.552.916,67

Aset lainnya pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 44.347.916,67 menurun sebesar Rp. 15.205.000,00 dibandingkan saldo TA 2021 sebesar Rp. 59.552.916,67.

- a. Saldo Aset Lainnya yang berasal dari Aset Tak Berwujud, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, Lisensi dan franchise, Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Aset tak berwujud	31 Desember 2022 (Rp.)	31 Desember 2021 (Rp.)	Kenaikan/ penurunan
1	Aset Tidak Berwujud Lainnya	680.820.000	680.820.000	0
	Jumlah	680.820.000	680.820.000	0

Jumlah tetap dibanding tahun 2021 sebesar Rp. 680.820.000,00 (31 Desember 2021 – 31 Desember 2022) adalah tidak ada penambahan dari realisasi belanja modal tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang.

- b. Saldo Aset Lainnya yang berasal barang yang masuk dalam rusak berat (RB) yang akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan tidak ada.
- c. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp. 16.472.083,33 Meningkat sebesar Rp. 15.205.000,00 dibandingkan saldo TA 2021 sebesar Rp. 1.267.083,33.



KEWAJIBAN

1. Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2022 Rp. 29.001.203.199,00	31 Desember 2021 Rp. 7.054.370,00
-----------------------------------	---	--

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 29.001.203.199,00, naik sebesar Rp. 28.994.148.829,00 bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.054.370,00.

Kewajiban merupakan kewajiban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang baik kepada pihak internal maupun eksternal sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran atau tanggal laporan keuangan dengan rincian sebagai berikut:

Untuk kewajiban jangka pendek sebagai akibat transaksi keuangan yang belum dibayar pada tahun 2022 pada dasarnya sudah terbayar semuanya, namun nilai pembayarannya tidak sesuai dengan data kewajiban karena terdapat kesalahan Pencatatan penganggaran beban hutang tidak ada.

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2022 Rp. 0,00	31 Desember 2021 Rp. 0,00
--	--	--

Pada tanggal 31 Desember 2022 saldo utang perhitungan fihak ketiga berasal dari pajak-pajak yang telah dipungut Bendahara Pengeluaran, namun sampai dengan 31 Desember 2022 belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 0,00.

b. Utang Belanja	31 Desember 2022 Rp. 29.001.203.199,00	31 Desember 2021 Rp. 7.054.370,00
-------------------------	---	--

Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 29.001.203.199,00 meningkat sebesar Rp. 28.994.148.829,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.054.370,00 terdiri dari utang belanja listrik Rp. 5.781.745,00, belanja air Rp. 321.600,00, belanja internet dan telepon sebesar Rp. 1.824.150,00 dan pada tahun 2022 ini ada utang belanja modal jalan kabupaten yang belum selesai pekerjaannya dan belum terbayarkan sebesar Rp. 28.993.275.704,00.



c. Pendapatan diterima di muka	31 Desember 2022 <hr/> Rp. 0,00	31 Desember 2021 <hr/> Rp. 0,00
---------------------------------------	--	--

Kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Saldo pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 0,00, tetap bila dibandingkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.

2. Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2022 <hr/> Rp. 0,00	31 Desember 2021 <hr/> Rp. 0,00
------------------------------------	--	--

Tidak ada kewajiban jangka panjang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban dengan Saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 757.735.315.219,02 mengalami peningkatan sebesar Rp. 42.975.734.465,85 atau 6,01% jika dibandingkan dengan ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 714.759.580.753,17.



B. LAPORAN OPERASIONAL

PENDAPATAN LO

Pendapatan LO dapat dikalsifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2022 sebesar Rp. 2.980.781.384,00 atau 288,66% meningkat sebesar Rp. 2.213.837.384,00 dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp. 766.944.000,00.

Masing – masing Pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2022 sebesar Rp. 2.980.781.384,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.213.837.384,00 dari nilai beban tahun lalu.

uraian	2022	2021	Kenaikan/ penurunan
Pendapatan Retribusi Daerah	2.968.082.384	762.525.000	2.205.557.384
Lain-lain PAD yang Sah	12.699.000	4.419.000	8.280.000
Pendapatan Hibah LO	0	0	0
Jumlah	2.980.781.384	766.944.000	2.213.837.384

2. Pendapatan Pajak Daerah - LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO TA 2022 sebesar Rp. 0,00 Tetap bila dibandingkan realisasi TA 2021 sebesar Rp.0,00 karena tidak ada pos pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang Tahun 2022.

a. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Daerah – LO dari pos Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

Akun	2022	2021	Kenaikan/ penurunan
1	2	3	4
1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.968.082.384	762.525.000	2.205.557.384
Jumlah	2.968.082.384	762.525.000	2.205.557.384



b. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan- LO

Pendapatan Daerah – LO dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tidak ada Pendapatan Daerah – LO dari pos Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan.

Akun	2022	2021	Kenaikan/ penurunan
1	2	3	4
1) Penjualan Drum Bekas	12.699.000	4.419.000	8.280.000
Jumlah	12.699.000	4.419.000	8.280.000

c. Lain-lain PAD yang Sah- LO

Pendapatan Daerah – LO dari pos Lain-lain PAD yang Sah adalah sebagai berikut:

Akun	2022	2021	Kenaikan/ penurunan
1	2	3	4
1) Pendapatan Hibah	0	0	0
Jumlah	0	0	0

Tidak ada pendapatan lain-lain PAD yang sah- Lo dari pendapatan hibah tahun 2022.

d. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO

pada Tahun 2022 tidak ada Lain-lain Pendapatan Daerah Yabng Sah- Lo.



Beban-LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Realisasi beban tersebut tahun 2022 dan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 8.423.481.338,00 dan mengalami peningkatan sebesar Rp. 281.404.311,00 atau 3,46% bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp. 8.142.077.027,00.

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan
1	Beban Pegawai	8.423.481.338	8.142.077.027	281.404.311
	Jumlah	8.423.481.338	8.142.077.027	281.404.311

b. Beban barang dan jasa

Beban barang dan jasa merupakan saldo beban periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp. 11.089.898.763,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.881.071.777,00,- atau 20.43% bila dibandingkan dengan Beban barang dan jasa tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp. 9.208.826.986,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ penurunan
1	Beban barang dan jasa	11.089.898.763	9.208.826.986	1.881.071.777
	Jumlah	11.089.898.763	9.208.826.986	1.881.071.777

c. Beban penyusutan dan amortisasi

Beban ini merupakan Beban Penyusutan yang berasal dari Belanja Modal Perolehan tahun anggaran 2022, Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen dan dilakukan perhitungan penyusutan secara bulanan.

Beban Penyusutan tahun 2022 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ penurunan
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.020.464.975,00	1.131.358.074,00	(110.893.099)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	45.692.850,00	45.870.052,00	(177.202)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	66.824.583.584,00	64.354.197.123,00	2.470.386.461
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	15.205.000,00	1.267.083,33	13.937.916,67
	Jumlah	67.905.946.409,00	65.532.692.332,33	2.595.394.678,67

d. Beban penyisihan piutang

Beban tersebut adalah Beban Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp. 5.761.941,04. dan meningkat sebesar Rp. 5.759.441,04 bila dibandingkan Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp. 2.500,00. dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Kenaikan/ penurunan
1	Beban Penyisihan Piutang	5.761.941,04	2.500	5.759.441,04
	Jumlah	5.761.941,04	2.500	5.759.441,04

Surplus/ Defisit LO

Surplus/Defisit - LO merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Surplus/Defisit sampai dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. (82.116.654.845,33).



C. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo awal ekuitas sebesar Rp. 714.759.580.753,17 merupakan saldo akhir ekuitas tahun anggaran 2021;
2. Surplus/defisit – LO tahun anggaran 2022 sebesar Rp. (89.380.943.667,04) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, diantaranya :
 - Koreksi Piutang sebesar Rp. 333.898.777,00
 - Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp. (4.821.789,11)
 - Koreksi Aset Tetap sebesar Rp. (7.123.895.322,00)
 - Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar Rp. (133.258.255)
4. Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Rp. 139.284.754.722,00
5. Ekuitas akhir Rp. 757.735.315.219,02



Bab VI.

PENJELASAN ATAS - INFORMASI NON KEUANGAN SKPD

- 1 Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Pokok :

Melaksanakan tugas pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum, dan tata ruang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas perbantuan.

Fungsi :

- 1 Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, dan tata ruang;
- 2 Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang;
- 3 Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang bina marga, sumber daya air dan penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
- 4 Penyelenggaraan kesekretariatan dinas;
- 5 Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum, dan penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
- 6 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 2 Arah Kebijakan, Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

2.1 Arah Kebijakan

Sedangkan arah kebijakan perekonomian Kabupaten Rembang pada tahun 2022 tetap disinergikan dengan arah kebijakan nasional yang diarahkan untuk mendorong kemampuan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dan mengurangi jumlah penduduk miskin dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi serta memperhatikan lingkungan internal dan eksternal.

2.2 Program / Kegiatan

1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah



- 2 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**
 - 1 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
- 3 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**
 - 1 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kantor
- 4 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**
 - 1 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
 - 2 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - 4 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- 5 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**
 - 1 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 6 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**
 - 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
- 7 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**
 - 1 Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
- 8 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**
 - 1 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 9 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**
 - 1 Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
- 10 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**
 - 1 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung



11 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

- 1 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota



Bab VII

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang per 31 Desember 2022.

Catatan Atas Laporan Keuangan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Realisasi pendapatan tidak memenuhi rencana yang dianggarkan dengan prosentase 55,60 %
- b. Realisasi belanja dibawah anggarannya dengan prosentase 42,73%
- c. Laporan keuangan ini disusun berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kami berharap penyampaian Catatan Atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak - pihak yang berkepentingan serta memenuhi ketentuan yang diatur dalam Standar Akutansi Pemerintahan.

Rembang, 31 Desember 2022

Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang

Drs. EC. GANTIARTO, St.
Nip. 19651226 199401 1 001